



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA

NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENCEGAHAN KORUPSI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara, perlu dilakukan pencegahan korupsi;

b. Bahwa untuk pencegahan korupsi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur pencegahan Korupsi;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara tentang pembentukan satuan tugas Pencegahan Korupsi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Tahun 2026

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 444);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENCEGAHAN KORUPSI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2026
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Unit Pencegahan Korupsi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Tahun 2026 sebagaimana tercantum pada lampiran I keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan wewenang Satuan Tugas Unit Pencegahan Korupsi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Tahun 2026, sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU adalah sebagai berikut:
1. Transparansi dan Akuntabilitas
 - a. Keterbukaan Informasi
Harus memastikan semua proses dan keputusan terkait penyelenggaran pemilu dan pemilihan diumumkan secara terbuka dan mudah diakses oleh public
 - b. Laporan Keuangan
Laporan keuangan, termasuk penggunaan anggaran harus diaudit secara independent dan dipublikasikan secara berkala
 - c. Pengawasan Internal
Perlu memiliki system pengawasan internal yang kuat dan efektif untuk mendeteksi serta mencegah potensi penyimpangan
 - d. Partisipasi Masyarakat
Melibatkan Masyarakat dalam pengawasan dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan dapat meningkatkan akuntabilitas dan

mencegah praktik korupsi

2. Regulasi dan Kebijakan

a. Penyusunan Peraturan yang jelas

Perlu memiliki peraturan yang jelas dan rinci terkait proses rekrutmen, pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta sanksi bagi pelaku korupsi

b. Evaluasi dan perbaikan

Peraturan dan kebijakan yang ada perlu dievaluasi secara berkala dan diperbaiki jika ditemukan kelemahan yang dapat dimanfaatkan untuk praktik korupsi.

c. Penegakan Hukum

Harus memastikan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi, tanpa pandang bulu.

3. Rekrutmen dan Sumber Daya Manusia

a. Proses Rekrutmen yang Adil

Perlu menerapkan system rekrutmen yang adil, transparan dan berbasis merit untuk memastikan integritas dan kompetensi calon penyelenggara pemilu dan pemilihan.

b. Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi

Memberikan Pendidikan dan pelatihan antikorupsi secara berkelanjutan kepada seluruh jajaran, termasuk penyelenggara pemilu dan pemilihan di Tingkat bawah.

c. Pengawasan Rekrutmen

Melibatkan pihak independent dalam proses rekrutmen untuk memastikan tidak ada intervensi atau praktik korupsi dalam proses tersebut.

4. Pengelola dan Kampanye

a. Transparansi Dana Kampanye

Dana kampanye partai politik dan calon harus dilaporkan secara transparan dan diaudit oleh Lembaga independent.

b. Pembatasan Dana Kampanye

Perlu menetapkan Batasan yang jelas terkait dengan besaran dana kampanye yang boleh dikeluarkan oleh partai politik dan calon.

c. Pengawasan Penggunaan Dana

Pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana kampanye untuk mencegah praktik korupsi dan

penyalahgunaan.

5. Penguat Integritas

a. Pendidikan Anti Korupsi

Perlu bekerjasama dengan KPK dan Lembaga terkait untuk memberikan Pendidikan antikorupsi kepada seluruh jajaran, serta Masyarakat luas.

b. Teladan Pemimpin

Harus menjadi contoh integritas dan kejujuran dalam menjalankan tugas dan wewenang

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Buranga
Pada Tanggal 15 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA,

Ttd

MUNARSY

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BUTON UTARA
Kepala Sub. Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Mansyur S

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
UNIT PENCEGAHAN KORUPSI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BUTON UTARA
TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN PADA SATUAN TUGAS UNIT
PENCEGAHAN KORUPSI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Munarsiy	Ketua KPU Kabupaten Buton Utara	Pengarah
2.	Sitti Asriani	Anggota KPU Kabupaten Buton Utara	Pengarah
3.	LM Miswar Adhi Putra	Anggota kpu Kabupaten Buton Utara	Pengarah
4.	Waode Nurmila	Anggota KPU Kabupaten Buton Utara	Pengarah
5.	Carison Musta	Anggota KPU Kabupaten Buton Utara	Pengarah
6.	Helmi	Sekretaris KPU Kabupaten Buton Utara	Ketua
7.	Mansyur S	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris
8.	Muh. Rusyaid	Kepala Subbagian Parmas dan SDM	Anggota
9.	La Ode Dasman	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
10.	Darmawan	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
12.	Yunazzil Rahmat Furqan Yasin	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemmilu dan Hukum	Anggota
13.	Iksan Jaya	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemmilu dan Hukum	Anggota

Ditetapkan di Buranga,
Pada Tanggal 15 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA,

Ttd
MUNARSY

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BUTON UTARA
Kepala Sub. Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Mansyur S